

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN,  
PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH,  
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN  
PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN**

*(Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu)*

**Bagus Ma'arif<sup>1)</sup>, M. Rasuli<sup>2)</sup>, Al Azhar A<sup>2)</sup>**

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email : [bagusmaarif59@gmail.com](mailto:bagusmaarif59@gmail.com)

*The Effect Of Application Of Government Accounting Standards, Implementation Of  
Regional Financial Accounting Systems, Human Resources Competence,  
And Application Of The Government Internal Control System  
To The Quality Of Financial Statements  
(Empirical Study On Regional Organizations Of Indragiri Hulu Regency)*

**ABSTRACT**

*This study aims to test: The effect of the application of government accounting standards, the application of regional financial accounting systems, competency of human resources, and the application of government internal control systems to the quality of financial statements. The population in this study is all apparatus in 27 Indragiri Hulu Regency OPD. In this study the sample used amounted to 81 respondents, who were selected using the purposive sampling method. This study uses primary data by distributing questionnaires. The analytical method used in this study is multiple linear regression analysis. The analytical tool used in this study is Statistical Product and Service Solution (SPSS) version 21. The results of this study indicate that: 1) the application of government accounting standards affects the quality of financial statements with a significant level of 0.003, 2) the application of regional financial accounting systems affect the quality of financial statements with a significant level of 0.019, 3) competency of human resources affect the quality of financial statements with a significant level of 0.033, and 4) the application of government internal control systems affect the quality of financial statements with a significant level of 0.006.*

**Keywords:** *Application of Government Accounting Standards, Implementation of Regional Financial Accounting Systems, Competence of Human Resources, Application of the Government Internal Control Systems, Quality of Financial Statements.*

**PENDAHULUAN**

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Menurut PP No. 71

Tahun 2010 tersebut, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas

dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan kualitas dari laporan keuangan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja keuangannya kepada publik. Karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki menurut PP No. 71 Tahun 2010, yaitu:

#### 1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

#### 2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

#### 3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

#### 4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan

pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Apabila laporan keuangan pemerintah daerah telah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif di atas, berarti laporan keuangan pemerintah daerah tersebut dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dapat mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakfektifan.

Hasil pemeriksaan BPK atas 537 LKPD Tahun 2016 yang dilaporkan dalam IHPS I tahun 2017, menemukan 6.053 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang terdiri dari permasalahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebanyak 2.156 kasus, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 2.657 kasus, dan kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak 1.240 kasus.

Dalam tahun yang sama, BPK juga menemukan kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi 6.115 permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial terdiri dari permasalahan yang mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp1,13 triliun, potensi kerugian daerah sebesar Rp419,60 miliar, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp537,72 miliar. Selain itu terdapat permasalahan ketidakpatuhan yang tidak berdampak finansial berupa penyimpangan administrasi. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, penda telah melakukan penyetoran uang

ke kas negara/daerah atau penyerahan aset sebesar Rp388,19 miliar.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun anggaran 2016 termasuk kedalam hasil audit yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Namun pada kenyataannya opini yang diberikan BPK tersebut belum tentu menjamin bahwa laporan keuangan yang dihasilkan tidak ada masalah atau kelemahan didalamnya. Faktanya ada temuan BPK Riau tentang Dana Operasional Mobil Dinas Pimpinan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu. Hal itu tentunya menjadi masalah serius bagi Wakil Ketua I DPRD Inhu, Sumini, S.Pdi. Berdasarkan hasil audit untuk tahun anggaran 2016, BPK menyebutkan bahwa telah terdapat kelebihan biaya operasional terhadap mobil dinas yang ia gunakan itu. "Berdasarkan aturan, ternyata untuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten/kota, mobil dinas yang digunakan maksimal 2200 cc. Sementara mobil yang dipinjam pakaikan kepada saya dalah 2500 cc, sehingga biaya operasionalnya mengalami kelebihan dari yang seharusnya", kata Sumini. (www.goriau.com).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?, 2) Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?, 3) Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?, dan 4) Apakah Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menguji pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, 2) Untuk menguji pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan, 3)

Untuk menguji pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan, dan 4) Untuk menguji pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Nordiawan (2010:151), laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan dari entitas lain.

### **Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan**

Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP menurut PP No. 71 Tahun 2010 adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

### **Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 232 ayat 3, sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Menurut Keputusan Kepala BKN No. 46A tahun 2003, kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

### **Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Menurut Mahmudi (2011:20), pengertian sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi dalam melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### **Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

#### **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Mahmudi (2011:271) mengemukakan bahwa standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan. Sementara menurut Deddi Nordiawan (2009:25) mengemukakan penerapan standar akuntansi pemerintahan di yakini berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah.

#### **H1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

#### **Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hubungan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan menurut Mahmudi (2016:27) bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah dalam satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas.

#### **H2: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

#### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis (Mardiasmo, 2018:146).

Bastian (2010) menyatakan bahwa penyiapan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas memerlukan sumber daya manusia yang menguasai akuntansi pemerintahan.

#### **H3: Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

#### **Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Mahmudi (2011:252), sistem pengendalian internal merupakan suatu proses pengendalian yang melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh karyawan yang dilakukan bukan hanya bersifat

insidental dan responsif atas kasus tertentu saja tetapi bersifat terus menerus.

#### **H4: Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

### **METODE PENELITIAN**

#### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur di 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hulu. Responden dalam penelitian ini adalah Kasubbag Keuangan, Bendahara, dan Staf Keuangan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 81 responden yang diambil dari masing-masing OPD.

#### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

##### **Kualitas Laporan Keuangan (Y)**

Kualitas laporan keuangan daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu dengan memiliki karakteristik yang sudah diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010. Indikator dalam variabel ini adalah (PP No. 71 Tahun 2010): 1) Relevan, 2) Andal, 3) Dapat Dibandingkan, 4) Dapat Dipahami.

##### **Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)**

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Menurut PP No. 71 Tahun 2010, variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat diukur dengan menggunakan 12 (dua belas) pernyataan standar yaitu: PSAP No. 01 tentang penyajian laporan keuangan, PSAP No. 02 tentang LRA, PSAP No. 03 tentang LAK, PSAP No. 04 tentang CaKL, PSAP No. 05 tentang akuntansi persediaan, PSAP No. 06

tentang akuntansi investasi, PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap, PSAP No. 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, PSAP No. 09 tentang akuntansi kewajiban, PSAP No. 10 tentang koreksi kesalahan, PSAP No. 11 tentang laporan keuangan konsolidasi, PSAP No. 12 tentang laporan operasional.

##### **Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)**

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan anggarannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Indikator variabel ini yaitu: 1) Kesesuaian sistem dengan SAP, 2) Pengidentifikasian transaksi, 3) Pencatatan transaksi, 4) Bukti disetiap transaksi, 5) Pencatatan kronologis, 6) Pengklasifikasian transaksi, 7) Laporan keuangan dilaporkan setiap periode Pelaporan yang konsisten dan periodik

##### **Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)**

Kompetensi Sumber Daya Manusia menurut Keputusan Kepala BKN No. 46A tahun 2003 adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Variabel ini diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh Ni Made Sudiarianti (2015) yaitu: Pengetahuan, Keahlian, Perilaku.

##### **Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X4)**

Sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang

dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Indikator variabel ini adalah (PP No 60 Tahun 2008): 1) Lingkungan Pengendalian, 2) Penilaian Resiko, 3) Kegiatan Pengendalian, 4) Informasi dan Komunikasi, 5) Pemantauan Pengendalian Intern

### Metode Analisis Data

#### Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2013). Varian dan standar deviasi menunjukkan penyimpangan data terhadap rata-ratanya (*mean*). Apabila standar deviasinya kecil, berarti nilai sampel atau populasinya mengelompok di sekitar rata-rata hitungannya.

#### Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk menguji hipotesis digunakan alat analisis regresi berganda, dengan alasan bahwa alat ini dapat digunakan sebagai model prediksi terhadap variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Uji hipotesis tersebut akan dilakukan dengan program SPSS 21. Untuk itu diformulasikan model regresi berganda sebagai berikut :

$$Y1 = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e$$

Dimana :

Y1 = Kualitas laporan keuangan

a = Konstanta

b1, b2, b3, b4 = Koefisien regresi

X1 = Penerapan standar akuntansi pemerintahan

X2 = Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah

X3 = Kompetensi sumber daya manusia

X4 = Penerapan Sistem pengendalian intern Pemerintah

e = Kesalahan pengganggu (error)

#### Uji Kualitas Data

##### Uji Validitas Data

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau ketepatan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukurinya,

##### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji yang menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi.

##### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik. Dalam model regresi, nilai residual harus mengikuti distribusi normal dan terbebas dari korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013).

##### Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, variabel independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Kolmogrov-Smirnov Test*. Suatu data dikatakan berdistribusi secara normal apabila nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari  $\alpha$  5%. (Umar; 2000 dalam Aryani; 2013).

##### Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskeastisitas atau jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139).

### Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam regresi ada beberapa cara, salah satunya adalah dengan melihat dari nilai *variance* bebas yang memiliki  $VIF > 10$  atau nilai *tolerance*  $< 0,10$  maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi (Ghozali, 2013).

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

### Uji Hipotesis

#### Uji T (*t-test*)

Sebelum melakukan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian model. Pengolahan data penelitian ini menggunakan bantuan analisis regresi berganda (*multiple regression*) dengan bantuan SPSS (*Statistical Product Service Solution*) *version* 21. Kemudian dilakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian. Kriteria yang digunakan untuk keempat hipotesis dalam menerima atau menolak hipotesis adalah:

1. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $t_{hitung} > -t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak (tidak ada pengaruh). T tabel dilihat dengan derajat bebas =  $n-k-1$ , dan apabila tingkat sig  $t > \alpha$  0,05 maka secara parsial variabel independen tersebut tidak ada hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $t_{hitung} < -t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima (ada pengaruh). T tabel dilihat dengan derajat bebas =  $n-k-1$ , dan apabila tingkat sig  $t < \alpha$  0,05 maka secara parsial variabel independen tersebut ada hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen.

### Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian (penerapan standar akuntansi pemerintahan, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, dan kualitas laporan keuangan) disajikan dalam tabel *descriptive statistics* yang menunjukkan angka minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi yang dapat dilihat pada berikut ini:

**Tabel 1**

**Descriptive Statistics**

	N	Min.	Maks.	Mean	Std. Dev
Penerapan SAP (X1)	75	74	145	110,65	14,251
Penerapan SAKD (X2)	75	16	40	30,97	4,152
Kompetensi SDM (X3)	75	50	100	77,83	12,691

Penerapan SPIP (X4)	75	44	110	85,77	10,995
KLK (Y)	75	42	75	58,11	6,811
Valid N	75				

Sumber: Data Olahan, 2018

### Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam analisis regresi selain mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan dependen, juga menunjukkan bagaimana hubungan antara variabel independen dengan dependen, sehingga dapat membedakan variabel independen dengan variabel dependen tersebut (Ghozali, 2013).

Tabel 2

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7,175	3,161		2,270	,026
Penerapan SAP	,130	,042	,272	3,119	,003
Penerapan SAKD	,437	,181	,266	2,411	,019
Kompetensi SDM	,081	,037	,151	2,178	,033
Penerapan SPIP	,194	,069	,314	2,812	,006

a. Dependent: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Data Olahan, 2018

Dari tabel tersebut, maka hasil persamaan regresi pada hipotesis pertama dan kedua dapat ditemukan sebagai berikut:

$$Y = 7,175 + 0,130X_1 + 0,437 X_2 + 0,081 X_3 + 0,194 X_4 + e$$

### Hasil Uji Validitas Data

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan *Person Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n-2$ , dimana  $n$  adalah jumlah sampel. Pada

penelitian ini diperoleh  $df=75-2=73$ . Nilai r tabel dengan derajat bebas ( $df$ ) 73 adalah sebesar 0,227. Nilai r tabel yang diperoleh dibandingkan dengan r hitung untuk menguji validitas dari data yang diperoleh. Jika  $r$  hitung >  $r$  tabel maka item pertanyaan setiap variabel dinyatakan valid, dan apabila  $r$  hitung <  $r$  tabel maka item pertanyaan setiap variabel dinyatakan tidak valid.

### Hasil Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen telah dipastikan validitasnya. Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* dengan bantuan program SPSS. Nilai alpha bervariasi dari 0–1, suatu pertanyaan dapat dikategorikan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2013:48). Jika nilai reliabilitas kurang dari 0,6 maka nilainya kurang baik. Artinya adalah bahwa alat ukur yang digunakan tidak reliabel. Nilai reliabilitas dalam penelitian ini bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3  
Hasil Uji Reliabilitas Data

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
KLK	0,927	0,6	Reliabel
Penerapan SAP	0,963	0,6	Reliabel
Penerapan SAKD	0,895	0,6	Reliabel
Kompetensi SDM	0,979	0,6	Reliabel
Penerapan SPIP	0,964	0,6	Reliabel

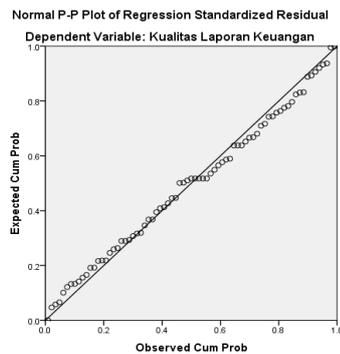
Sumber: Data Olahan, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa semua instrumen penelitian adalah reliabel karena *Cronbach Alpha* lebih besar dari nilai koefisien alpha 0.6, berarti variabel yang digunakan sudah konsisten dan dapat dipercaya.

### Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat dan variabel bebas dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini hasil uji normalitas dengan uji statistik 1-sampel K-S dalam gambar berikut.

**Gambar 1**



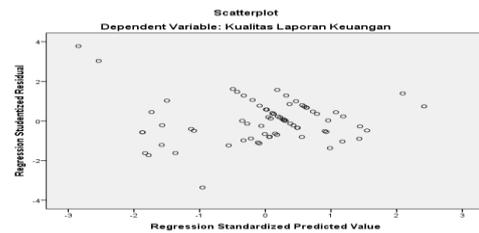
Sumber: Data Olahan, 2018

Berdasarkan gambar tersebut, hasil uji normalitas dapat terlihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov untuk semua persamaan regresi signifikan di atas 0,05. Hal ini menyatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang diprediksi dan sumbu X adalah residual ( $Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$ ) yang telah *di-studentized*. Jika ada pola tertentu (bergelombang, menyebar kemudian menyempit), maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

**Gambar 2**



Sumber: Data Olahan, 2018

Dari gambar di atas, terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar di atas dan di bawah angka 0. Oleh karena itu dapat dikatakan model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

### Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukannya adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation factor* (VIF). Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah nilai besaran *Variance Inflation Faktor* (VIF)  $< 10$  dan *Tolerance*  $> 0,10$ . Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4**

Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Collinearity Statistics		Keterangan
		Tolerance	VIF	
1	(Constant)			
	Penerapan SAP	,389	2,570	Tidak terdapat multikolinearitas
	Penerapan SAKD	,243	4,119	Tidak terdapat multikolinearitas
	Kompetensi SDM	,616	1,625	Tidak terdapat multikolinearitas
	Penerapan SPIP	,238	4,201	Tidak terdapat multikolinearitas
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan				

Sumber: Data Olahan, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa semua variabel tersebut, keseluruhan nilai toleransi  $> 0.1$  dan

nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari pengaruh multikolinearitas.

### Hasil Uji Autokorelasi

Untuk menguji Autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Waston (DW), yaitu jika nilai DW terletak antara  $du$  dan  $(4 - dU)$  atau  $du \leq DW \leq (4 - dU)$ , berarti bebas dari Autokorelasi. Jika nilai DW lebih kecil dari  $dL$  atau DW lebih besar dari  $(4 - dL)$  berarti terdapat Autokorelasi. Nilai  $dL$  dan  $dU$  dapat dilihat pada tabel Durbin Waston, yaitu nilai  $dL$ ;  $dU = \alpha$ ;  $n$ ;  $(k - 1)$ . Keterangan :  $n$  adalah jumlah sampel,  $k$  adalah jumlah variabel, dan  $\alpha$  adalah taraf signifikan. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,890 <sup>a</sup>	,780	3,191	2,077

Sumber: Data Olahan, 2018

Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai Durbin-Watson model adalah 2,077. Dari tabel Durbin Watson dengan  $\alpha = 5\%$ ;  $n = 75$ ;  $(k - 1)$  didapatkan nilai  $dU$  1,769. Dari nilai tersebut diketahui bahwa  $4 - dU = 4 - 1,769 = 2,231$ . dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai Durbin Watson 2,077 lebih besar dari 1,769 dan lebih kecil dari 2,231. Artinya tidak terjadi masalah autokorelasi pada model yang dibangun.

### Koefisien Determinasi ( $R_2$ )

Koefisien determinasi adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase semua pengaruh variabel independen dan variabel moderating terhadap variabel dependen. Persentase tersebut menunjukkan seberapa besarnya variabel independen dan variabel moderating dapat menjelaskan variabel dependen. Semakin besar koefisien

determinasi maka akan semakin baik variabel independen dan variabel moderating menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian persamaan regresi yang dihasilkan, baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen.

**Tabel 6**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,890 <sup>a</sup>	,792	,780	3,191

Sumber: Data Olahan, 2018

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,792. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel bebas terhadap Y adalah sebesar 79,2%. Sedangkan sisanya 20,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

### Pembahasan

#### Hipotesis 1 : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis pertama pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7**  
**Hasil Pengujian Hipotesis Pertama**

Variabel	t-hitung	t-tabel	Sig	Keterangan
Penerapan SAP (X1)	3,119	1,993	0,003	Berpengaruh

Sumber: Data Olahan, 2018

Dari tabel tersebut diketahui nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,993 pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan uji regresi, diketahui nilai  $t_{hitung}$  variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan sebesar 3,119 dengan signifikansi 0,003. Dengan demikian  $t_{hitung} (3,119) > t_{tabel} (1,993)$  dengan signifikansi  $(0,003) < (0,05)$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa  $H_{a1}$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa

penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di Kabupaten Indragiri Hulu.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan bahwa standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dhedy Triwardana (2017) yang menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah yang menerapkan standar akuntansi pemerintahan akan meningkatkan kualitas laporan keuangannya.

**Hipotesis 2 : Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hasil pengujian hipotesis kedua pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 8**  
**Hasil Pengujian Hipotesis Kedua**

Variabel	t-hitung	t-tabel	Sig	Keterangan
Penerapan SAKD (X2)	2,411	1,993	0,019	Berpengaruh

Sumber: Data Olahan, 2018

Dari tabel tersebut diketahui nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,993 pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan uji regresi, diketahui nilai  $t_{hitung}$  variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 2,411 dengan signifikansi 0,019. Dengan demikian  $t_{hitung} (2,411) > t_{tabel}$

(1,993) dengan signifikansi  $(0,019) < (0,05)$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa  $H_{a2}$  **diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di Kabupaten Indragiri Hulu.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 232 ayat 3, mengemukakan “Sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.”

Penelitian ini sejalan dengan penelitian As Syifa Nurillah dan Dul Muid (2014) yang menyatakan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.

**Hipotesis 3 : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hasil pengujian hipotesis ketiga pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 9**  
**Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga**

Variabel	t-hitung	t-tabel	Sig	Keterangan
Kompetensi SDM (X3)	2,178	1,993	0,033	Berpengaruh

Sumber: Data Olahan, 2018

Dari tabel tersebut diketahui nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,993 pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan uji regresi, diketahui nilai  $t_{hitung}$  variabel kompetensi

sumber daya manusia sebesar 2,178 dengan signifikansi 0,033. Dengan demikian  $t_{hitung} (2,178) > t_{tabel} (1,993)$  dengan signifikansi  $(0,033) < (0,05)$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa  $H_{a3}$  **diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di Kabupaten Indragiri Hulu.

Menurut Mardiasmo (2018:146), kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kerjanya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurendah Ragillita Untary (2015) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini berarti semakin berkompeten sumber daya manusia yang ada maka semakin berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

#### **Hipotesis 4 : Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hasil pengujian hipotesis keempat pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 10**  
**Hasil Pengujian Hipotesis Keempat**

Variabel	t- hitung	t- tabel	Sig	Keteran gan
Penerapan SPIP (X4)	2,812	1,993	0,006	Berpengaruh

**Sumber:** *Data Olahan, 2018*

Dari Tabel 10 tersebut diketahui nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,993 pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan uji regresi, diketahui nilai  $t_{hitung}$  variabel penerapan sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 2,812 dengan signifikansi 0,006. Dengan demikian  $t_{hitung} (2,812) > t_{tabel}$

$(1,993)$  dengan signifikansi  $(0,006) < (0,05)$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa  $H_{a4}$  **diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di Kabupaten Indragiri Hulu.

Definisi sistem pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ni Made Sudiaranti (2015) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti semakin baik penerapan sistem pengendalian intern pemerintah maka kualitas laporan keuangan tersebut akan semakin baik pula.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil dari pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Hasil dari pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Hasil dari pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

- Hasil dari pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

### Saran

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut:

- Dalam penelitian selanjutnya perlu dilakukan wawancara yang mungkin dapat mengendalikan jawaban tiap responden.
- Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan pengujian dengan menambahkan variabel lain seperti *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi dan lain sebagainya.
- Berhasilnya hipotesis bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi pertanggungjawaban keuangan kepada publik agar laporan keuangan yang dihasilkan lebih berkualitas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A., Randal J. Elder, and Mark S. Beasley, 2012. *Auditing and Assurance Service An Integrated Approach, 14th Edition*, Pearson Education Limited, England.
- Bastian, Indra, 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Edisi Ketiga, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (COSO), 2013. *Internal Control – Integrated Framework*, <http://www.coso.org/>, 24 Juni 2018.
- Ghozali, Imam, 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul, dan Syam Kusufi, 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Mahmudi, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*, UII Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2018. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Moeheriono, 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nordiawan, Dedi, 2009. *Akuntansi Pemerintahan Edisi kesatu*, Salemba Empat, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Nurillah, As Syifa, dan Dul Muid, 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Depok*, ISSN: 2337-3806, Jurnal Penelitian Universitas Diponegoro, Vol. 3 No. 2, Hal. 1-13.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

- Triwardana, Dhedy, 2017. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Kampar*, Jurnal Penelitian Universitas Riau, JOM Fekon Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017, Hal 641-655.
- Untary, Nurendah Ragillita Dan Moh Didik Ardiyanto, 2015. *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Faktor Eksternal Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang)*, ISSN: 2337-3806, Jurnal Penelitian Universitas Diponegoro, Vol. 4, No. 2, Hal. 1-12.
- Yensi, Desy Sefri, 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi*, Jurnal Penelitian Universitas Riau, JOM FEKON Vol. 1, Hal. 1-15.
- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, *Siaran Pers tentang Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas LKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2014*, <http://pekanbaru.bpk.go.id>, 24 Juni 2018.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017*, <http://www.bpk.go.id>, 24 Juni 2018.
- Keputusan Kepala BKN Nomor 46A tahun 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.